Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK DALAM REKONSTRUKSI EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Diyan Suliswati¹, Fahrur Razi²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹Diyansuliswati@gmail.com, ²Froziyas@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mengenai pemulihan dalam bidang ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sebagai upaya perbaikan dan pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, yang mana narasumbernya merupakan perangkat desa yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, selain itu narasumbernya ada Ketua Anshor, penjual dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam membantu sukseskan kebijakan tersebut. Tujuan peneliti ini adalah untuk memberikan gambaran serta edukasi terhadap masyarakat di bidang perekonomian dalam menghadapi bencana nasional non alam dan pasca bencana serta untuk menginspirasi Pemerintah Desa yang lain dalam membuat kebijakan rekonstruksi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dari Pemerintah Desa Lowayu dalam rekonstruksi ekonomi adalah dengan melakukan normalisasi kembali kegiatan ekonomi di masyarakat dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dan menerapkan kebiasaan hidup sehat, seperti cuci tangan, menjaga pola makan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Ekonomi, Covid-19

ABSTRACT

This article aims to describe the policies made by the Lowayu Village Government, Dukun District, Gresik Regency regarding recovery in the economic field after the Covid-19 pandemic. As an effort to improve and restore the lives of people in the village area. This researcher uses interview and observation methods, where the informants are village officials involved in making the policy, besides the speakers there are chairmen anshor, sellers and the public who participate in helping the success of the policy. The aim of this researcher is to educate the public in the economy in the face of non-natural and post-disaster national disasters and to inspire other Village Governments in making economic reconstruction policies after the Covid-19 pandemic. The results showed that the policy of the Lowayu Village Government in economic reconstruction was to normalize economic activities in the community by continuing to adopt healthy living habits, such as washing hands, maintaining diet and maintaining environmental hygiene.

Keywords: Reconstruction, Economic, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 di seluruh dunia ini dikejutkan dengan adanya virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan Cina pada bulan Desember tahun 2019. Dunia digemparkan dengan adanya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2). Negara yang sudah dipastikan terjangkit Covid-19 sampai saat ini ada 65 negara. (Data WHO, 1 Maret 2020) (Yuliana, 2020).

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*), menetapkan wabah penyakit Covid-19 atau virus corona (SARS CoV-2) menjadi pandemi global. Peningkatan status tersebut diumumkan secara langsung oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus di Jenewa, Swiss. Adanya penetapan status pandemi ini karena penyebarannya begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pertama kali ada

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

wabah. Dengan adanya status pandemi ini, WHO meminta seluruh negara untuk meningkatkan respon darurat terhadap Covid-19 (Kompas Dunia, 2020).

World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona Virus disease 2019 (COVID-19). Pada awalnya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apa bisa melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis yang terinfeksi dari salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “Super spreader”. (Channel NewAsia, 2020).

Menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita ada 90.308 terinfeksi Covid-19. Di Indonesia awalnya yang terinfeksi ada 2 orang. Angka kematian mencapai 3.087 atau 2.3% dengan angka kesembuhan 45.726 orang. Terbukti dari pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita setelah berkontak secara langsung dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengalami demam, batuk dan sesak napas (WHO, 2020).

Kejadian adanya Coronavirus bukanlah kejadian yang pertama kali. Pada tahun 2002 *severe acute respiratory syndrome* (SARS) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-CoV) dan penyakit *Middle East respiratory syndrome* (MERS) tahun 2012 disebabkan oleh MERS-Coronavirus (MERS-CoV) dengan total akumulatif kasusnya sekitar 10.000 (1000-an kasus MERS dan 800-an kasus SARS). Mortalitas akibat SARS sekitar 10% sedangkan MERS lebih tinggi yaitu 40%. (Yuliana, 2020).

Virus Covid-19 membawa bencana di seluruh dunia. Pemerintah daerah telah banyak melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui beberapa teknik yaitu *koersif*, *informatif*, *canalizing*, *edukatif*, *persuasif* dan *redudancy* dalam upaya memberi instruksi

atau himbauan pada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Namun masih belum melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi untuk efek jera bagi pelanggarnya. Pemerintah pusat masih belum maksimal dalam peran menggunakan strategi komunikasi secara komperhensif bagi seluruh Pemerintah daerah. Hal ini terjadi akibat belum adanya komando Nasional dari Pemerintah pusat yang dikenal lambat dalam mencegah penularan Covid-19 yang sudah menjadi bencana global (Ibrahim, Kamaluddin, Mintasrihardi, AM Junaidi, Gani Abd Arsyad, 2020). Akibat banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, Pemerintah pada akhirnya membuat kebijakan mengenai sanksi atau denda bagi masyarakat yang melanggar.

Adanya dampak yang sangat luar biasa baik diseluruh dunia bahkan desa-desa yang ada di Indonesia. Desa-desa terpengaruh terutama dalam bidng ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan dari pusat. Datangnya wabah Covid-19 menjadikan beberapa pembangunan ekonomi dan desa kelihatanya tidak berjalan secara maksimal. Perlu adanya demokrasi untuk mempengaruhi penanggulangan Covid-19 yang merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan yang harus dilaksanakan sebagaimana visi dan misinya yang harus sejalan dengan pancasila. (Sarip, Syarifudin Aip, Muaz Abdul, 2020).

Dalam menindaklanjuti adanya wabah Covid-19 langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan dana darurat. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meminta persetujuan Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yan dan seluruh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menggunakan dana darurat tersebut. Meski Covid-19 bukan bencana alam melainkan menjadi sebuah fenomena bencana global. Sedangkan Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim mengatakan upaya pencegahan dalam

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

penyebaran Covid-19 dilakukan di kecamatan hingga di desa. Upaya yang dilakukan yaitu pemberian masker, penyemprotan disinfektan, serta pembagian hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh tidak harus dilakukan di perkotaan saja melainkan harus menjangkau sampai kecamatan bahkan desa. (Liputan 6, 2020).

Kondisi ekonomi global pasca pandemi Covid-19 masih menjadi tanda tanya besar banyak pihak. Kekhawatiran akan lambatnya pemulihan ekonomi setelah terpukul telak oleh pandemi Covid-19, masih membayangkan pelaku usaha dan juga pemerintah di berbagai negara. Menteri Perdagangan periode 2011-2014 Gita Wirjawan mengatakan, “Tidak mudah untuk memprediksi bagaimana kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Namun akan ada beberapa atribut mewarnai era pasca Covid-19,” ucapnya, Minggu (14/6/2020). Pertama, Gita Wirjawan memprediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi di berbagai negara masih akan berlanjut ke depannya. Ini utamanya diakibatkan oleh anjloknya permintaan. Kemudian, produktifitas di berbagai sektor usaha juga diprediksi akan mengalami penurunan karena terganggunya rantai pasok global. Akan terjadi juga tren peningkatan pengajuan pinjaman di tingkat nasional, perusahaan dan individu. Selain itu, adanya kesenjangan antara pasar modal dan sektor ekonomi riil akan terjadi. Hal ini disebabkan ada pelanggaran kuantitatif dan *quantitative easing* yang dilakukan oleh beberapa negara maju. Berimbas pada uang yang telah dicetak secara signifikan tidak benar-benar teralirkan ke level terendah di ekonomi riil, dan justru terperangkap di banyak instrumen pasar modal. Dengan melemahnya konsumsi selama pandemi Covid-19, Gita juga memprediksi pergerakan inflasi akan cenderung landai, bahkan bukan tidak mungkin deflasi terjadi. Terakhir jika melihat polarisasi lebih lanjut antara Cina dan Amerika Serikat, sebagian orang disebut dengan decoupling. Melalui berbagai proyeksi tersebut, Gita mendorong Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dan populasi terbanyak di

dunia untuk dapat memposisikan dirinya dalam peranan sentral global. Dalam rangka keterlibatan di seluruh dunia dalam konteks ekonomi dan geopolitik. (Kompas, 2020).

Menindaklanjuti hal tersebut, rekonstruksi ekonomi dilakukan sebagai upaya pemulihan atau perbaikan pasca pandemi Covid-19. Presiden Jokowi merilis aturan berisi skema pemulihan ekonomi nasional dari dampak dan tekanan dari Covid-19. Aturan itu tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona virus disease 2019, atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dalam Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi 9 Mei 2020 lalu, ia merinci upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional disebabkan tekanan virus corona. Pertama, mengelompokkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Pemberian PMN tersebut digunakan untuk memperbaiki struktur modal BUMN atau anak usahanya yang terdampak virus corona. Suntikan modal juga ditunjukan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau anak usahanya dalam menjalankan penugasan khusus pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kedua, menempatkan dana khusus di bank peserta yang nanti dapat ditetapkan menteri yang kriterianya ditetapkan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisiner OJK. Penempatan dana tersebut dimaksudkan untuk menyangga likuiditas bank pelaksana yang membutuhkan uang untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, selain itu juga memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal. Ketiga, investasi pemerintah yang dilakukan sesuai dengan aturan perundangan. Keempat, melaksanakan penjaminan baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk. Selain empat cara tersebut, pemerintah juga dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan belanja negara. Belanja tersebut tidak terbatas pada

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga penyaluran kredit pemerintah. Dana ini digunakan untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional yang dapat diambil pemerintah dari APBN maupun sumber dana lain sesuai aturan perundangan. Sumber yang disebut yaitu penerbitan Surat berharga Negara (SBN). Jokowi dalam pertimbangan beleid ini menyatakan aturan yang dibuat untuk melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona virus disease atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, atau stabilitas sistem keuangan. Sebagai informasi, virus corona yang menyebar di dalam negeri dalam beberapa bulan belakangan ini telah memberikan tekanan yang besar untuk ekonomi dalam negeri. Salah satu tekanan bisa dilihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 yang anjlok ke level 2,97%. Tekanan tersebut mulai memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat. Salah satunya, meningkatnya angka PHK pekerja. Bappenas memperkirakan virus corona berpotensi meningkatkan angka pengangguran sampai dengan 4,22 juta orang pada tahun 2020 ini. (CNN Indonesia, 2020).

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (Alam, Nurcahyanto, Sulandri, 2020). Rekonstruksi bidang ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang menganalisis perkembangan ekonomi yang merupakan fungsi dari faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Selain itu menurutnya ekonomi pembangunan biasanya disamakan dengan ekonomi pertumbuhan, sedangkan pengertian ekonomi pertumbuhan menganalisis

pemerataan ekonomi yang merupakan fungsi dari faktor-faktor ekonomi. (Wirasasmitha, 2006).

Permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi saat pandemi Covid-19, adanya ancaman resesi ekonomi akan terasa dan menimbulkan domino. Ketika investasi anjlok saat resesi, lapangan pekerjaan akan berkurang sehingga angka pengangguran akan naik signifikan. Sementara, produksi atas barang dan jasa juga merosot sehingga menurunkan PDB (Produk Domestik Bruto). Jika tidak diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor seperti macetnya kredit perbankan hingga terjadi inflasi yang sulit dikendalikan, atau sebaliknya deflasi. Resesi menurut sejumlah literatur adalah menurunnya kegiatan ekonomi secara signifikan yang terjadi dalam beberapa bulan. Adanya jumlah indikator untuk mendeteksi diantaranya penurunan PDB, merosotnya pendapatan riil, bertambahnya pengangguran, sepiya penjualan retail dan terpuruknya industri manufaktur. (Kompas, 2020).

Penelitian tentang kebijakan rekonstruksi ekonomi pasca bencana telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian rekonstruksi ekonomi pasca bencana alam. Penelitian tentang kebijakan ekonomi pasca bencana non alam belum banyak dilakukan karena belum banyak yang melakukan penelitian tersebut, khususnya terkait rekonstruksi ekonomi pasca pandemi covid-19. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang kebijakan rehabilitasi ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kajian baru baik di tingkat nasional maupun internasional di bidang rekonstruksi ekonomi pasca bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat menjawab pertanyaan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

penulis untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap permasalahan yang diajukan. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Sumber data lapangan langsung berupa data situasi alami dan peneliti adalah instrumen kunci, bersifat deskriptif, menekankan proses kerja, analisis data bersifat induktif dan makna merupakan hal utama dalam pendekatan (Danim, 2020).

Bahwa instrumen penelitian itu manusia sendiri. Jadi peneliti merupakan instrumen utama yang memiliki andil dalam penelitian. Selain itu penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mengeksplorasi, mendiskripsikan, dan mengeksplanasi. Adanya eksplorasi, diistilahkan oleh Koeantjaraningrat sebagai penelitian yang bersifat menjelajah. Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui suatu fenomena yang nampak lebih lanjut. Tujuan deskripsi merupakan upaya melukiskan, memaparkan, atau menguraikan fenomena yang sudah dan sedang berlangsung. (Gumilang, 2016).

Studi kasus menjadi suatu strategi penelitian ini. Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi suatu sistem yang terikat atau sebuah kasus yang terjadi selama kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci dari berbagai informan yang dapat dipercaya.

Dalam melakukan penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam rekonstruksi ekonomi pasca pandemi Covid-19 ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan interaksi dengan responden.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi pada informan yang sudah dipilih. Adapun langkah yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan data sebagai berikut: 1) Mengirimkan surat izin KKN dari kampus sebagai formalitas penelitian; 2) Wawancara; 3) Observasi; 4) Dokumentasi; 5) Sumber internet resmi seperti berita maupun jurnal; 6) Analisis data; 7) Triangulasi data untuk menguji kredibilitas data.

Pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan tidak cacat dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber mulai dari perangkat desa, ketua Anshor, pedagang yang terakhir masyarakat. Sebelum melakukan wawancara dan observasi peneliti mengajukan surat izin wawancara terlebih dahulu ke Balai Desa Lowayu. Setelah disetujui peneliti baru menjalankan wawancara dan observasi. Sedangkan untuk wawancara ke masyarakat dan pedagang izin terlebih dahulu secara pribadi dengan menjelaskan tujuan dan maksud peneliti wawancara kepada mereka. Agar data-data yang diperoleh dari narasumber valid dan tidak cacat oleh karena itu perlu dianalisis dan ditriangulasi untuk melihat keabsahan data.

Narasumber penelitian ini adalah perangkat-perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam memberi kebijakan. Sedangkan ketua Anshor, pedagang, masyarakat yang diberi kebijakan. Peneliti memilih sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan valid.

Analisis data peneliti menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif yang menurut Miles dan Huberman (1994) yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya pembuatan kesimpulan dimana peneliti membuat kesimpulan (Gumilang, 2016).

Validasi data peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mendapatkan dan memeriksa data yang benar-benar dapat diuji keabsahan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data yang diperoleh tidak invalid (cacat).

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemerisaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu; derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Desa dalam rekonstruksi ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi tema yang sangat menarik untuk dibahas. Ketika wawancara dengan narasumber terdapat beberapa kebijakan dari Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Pertama, kebijakan mengenai kegiatan perekonomian di Pasar Turi Lowayu. Kedua, kebijakan mengenai pedagang keliling dari luar desa. Ketiga, kebijakan pemilik toko seperti; material, sembako dan lain-lainnya. Keempat, kebijakan pengirim barang baik pos atau pemasok barang ke toko-toko di Desa Lowayu. Selain itu yang boleh masuk pemasok barang hanya untuk di toko-toko yang besar saja.

Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dan saling mendukung baik relawan Desa Lowayu bahkan masyarakat sendiri ikut berpartisipasi. Bisa dibilang semenjak adanya Covid-19 kondisi dibidang perekonomian ikut menurun. Masyarakat yang bekerja baik sebagai pedagang, buruh pabrik, TKI, dan lain sebagainya terkena imbasnya. Untuk kondisi ekonomi pengusaha baik material atau jobong (batu dibakar) semenjak Covid-19 ikut terkena imbasnya dimana saat perjalanan mengirim barang atau mengambil barang, perjalanannya ikut terhambat karena ada penerapan social distancing, banyak jalan diahlikan bahkan ditutup. Sedangkan untuk TKI baik di Malaysia, Cina dan lain sebagainya ikut terkena imbasnya, dimana negara tempat bekerja mereka menerapkan kebijakan lockdown dalam upaya mengurangi penyebaran Covid-19. Masyarakat Desa Lowayu yang bekerja sebagai TKI selama tiga bulan tidak bisa bekerja dan mengirim uang

untuk keluarganya di Desa Lowayu. Sedangkan buruh pabrik ada yang terkena PHK, dimana pabrik tempat bekerja mereka mengurangi karyawan semenjak penyebaran Covid-19 semakin tinggi. Sedangkan untuk para petani tidak begitu terkena imbasnya karena masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan mereka seperti biasanya.

Kebijakan yang pertama, Bapak Amin selaku Kepala Desa Lowayu mengungkapkan mengenai kebijakan saat pandemi Covid-19 membuat kebijakan ditutupnya Pasar Turi Lowayu untuk masyarakat luar desa, jadi hanya masyarakat lokal saja baik penjual maupun pembeli yang diperbolehkan melakukan aktivitas perekonomian di pasar. Diperbolehkan melakukan aktivitas perekonomian di pasar dengan syarat mematuhi peraturan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan disemprot disinfektan terlebih dahulu sebelum masuk dan keluar pasar. Sedangkan kebijakan Pemerintah Desa Lowayu di masa transisi new normal, dalam upaya pemulihan kondisi perekonomian masyarakat. Membuka kembali pasar turi untuk masyarakat umum, agar aktivitas perekonomian di pasar yang dulunya sempat sedikit terhambat kini bisa dipulihkan kembali. Dengan syarat tetap menjalankan protokol kesehatan. Dalam penjelasan lainnya, Bapak Ridwan selaku Ketua Anshor mengungkapkan mengenai kebijakan penutupan pasar saat masa pandemi Covid-19, para relawan ikut serta membantu dengan membuat disinfektan yang disemprot sebelum dan sesudah masuk pasar, membagikan masker untuk masyarakat saat di pasar.

Kebijakan yang kedua, Bapak Amin selaku Kepala Desa mengungkapkan mengenai kebijakan mengenai pedagang keliling dari luar Desa Lowayu. Saat pandemi Covid-19 pedagang keliling dari luar desa dilarang untuk berdagang di Desa Lowayu untuk sementara. Sedangkan saat transisi new normal pemerintah desa membuat kebijakan mulai tanggal 18 Juni pedagang dari luar desa sudah diperbolehkan untuk berdagang kembali, dengan syarat memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan. Dalam

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

penjelasan lainnya, Bapak Ridwan selaku Ketua Anshor mengungkapkan mengenai kebijakan mengenai pedagang dari luar desa saat pandemi tidak diperbolehkan untuk berdagang, sedangkan dimasa transisi new normal diperbolehkan kembali untuk berdagang dengan memakai masker dan mengikuti ajuran protokol kesehatan.

Kebijakan yang ketiga, Bapak Sukri selaku Seketaris Desa mengungkapkan mengenai kebijakan pemilik toko-toko di desa baik material, sembako dan lain sebagainya. Setiap toko-toko harus menyediakan tempat cuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan. Dalam penjelasan lainnya, Bapak Ridwan selaku Ketua Anhsor mengungkapkan mengenai kebijakan toko-toko di desa. Para relawan ikut membantu memeriksa setiap toko-toko sudah atau belum menyediakan tempat cuci tangan dan mengikuti protokol kesehatan.

Kebijakan yang keempat, Bapak Ridwan selaku Ketua Anshor mengungkapkan mengenai pengirim barang baik pos atau pemasok barang ke toko-toko di Desa Lowayu. Kebijakan disaat pandemi Covid-19, untuk pemasok barang ke toko. Dilarang masuk ke toko, hanya boleh menurunkan barangnya saja. Karena disaat itu orang dari luar dilarang masuk desa bila tidak ada keperluan yang sangat penting, selain pemasok barang toko besar diperbolehkan seperti Toko Kautsar dan lain sebagainya. Kebijakan saat transisi new normal para pemasok barang di toko, diperbolehkan masuk ke toko-toko baik besar maupun kecil untuk menurunkan barangnya, dengan syarat menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi para relawan turut membantu memantau pemasok barang ke toko-toko untuk mematuhi kebijakan dan protokol kesehatan yang ada. Untuk pengirim seperti pos, boleh masuk desa dengan syarat dicek suhu tubuh, cuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tersebut. Mengutamakan kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat desa dari ancaman penyebaran

Covid-19. Adanya Covid-19 ini sangat berdampak dalam berbagai bidang, untuk bidang ekonomi kondisinya menurun dimasa pandemi ini. Dalam penjelasan lainnya, Ibu Taslina selaku Penjual Kue mengungkapkan walaupun Covid-19 ini sangat mengehebohkan, namun masih tetap bisa berjualan karena di Desa Lowayu tetap diperbolehkan. Masyarakat di desa ini juga dihimbau untuk jaga jarak dan selalu memakai masker, sehingga saya menyediakan juga tempat cuci tangan di depan tempat berjualan saya untuk mengantisipasi terjadi penularan virus ini. Untuk pendapatan hasil usaha selama pandemi Covid-19 ini, yang jelas pasti menurun karena kebanyakan pelanggannya 50% dari luar desa. Dalam penjelasan lainnya, Kakak Fahrudin selaku masyarakat mengungkapkan adanya Covid-19 memang sangat berdampak pada berbagai macam bidang terutama ekonomi. Dari segi perekonomian, khususnya Kepala Keluarga mengalami penurunan dalam pendapatan. Semua masyarakat mengalaminya, kalau tanggapan dari saya mengenai pemerintah seharusnya bisa membantu sepenuhnya terhadap warganya. Mengenai bantuan BLT-DD, JPS, dan BPNT seharusnya bisa mendapatkan sesuai apa yang dikatakan Presiden Jokowi dulu. Bantuan ini bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 bukan hanya masyarakat miskin saja yang berhak mendapatkan. Kondisi ekonomi semuanya mengalami penurunan, salah satunya bidang karir. Mas Fahrudin ini baru lulus perguruan tinggi, dimana awalnya mau mencari pekerjaan namun ditunda terlebih dahulu, karena disemua media berita online rata-rata memberitakan tidak membuka lowongan pekerjaan malah sebaliknya perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga kerjanya faktor pandemi Covid-19. Sedangkan tanggapan mengenai rekonstruksi ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Desa Lowayu, sarannya pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat dalam upaya pemulihan ekonomi, memimalkan harga-harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat yang perekonomiannya ditingkat rendah mampu menghidupi keluarganya. Pada awalnya

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Pemerintah Desa memang hanya memberi bantuan bagi masyarakat miskin saja sehingga tidak merata semuanya mendapatkan bantuan, padahal semua masyarakat terkena dampak dari virus ini. Namun pada tanggal 27 Juni pemerintah desa memberi bantuan kepada seluruh masyarakat desa, dengan syarat menggunakan masker. Jadi pemerintah desa menunjuk Ketua RT untuk memberi pemberitahuan pada tanggal 27 Juni akan diadakan pemberi bantuan dari pemerintah desa, selain itu memberi undangan dan menjelaskan untuk menfoto kopi kartu keluarga dengan jumlah 5 kali dan foto kopi kartu tanda penduduk kepala keluarga satu kali. Bantuan itu berbentuk uang tidak sembako atau yang lainnya, sehingga masyarakat dapat menggunakan uangnya sesuai kebutuhan mereka.

Dalam kebijakan-kebijakan tersebut yang telah dibuat pemerintah desa, perencanaan kebijakan mengenai kemungkinan Covid-19 sebelum mewabah di wilayah desa dan saat mewabah juga sudah dipersiapkan secara detail dan terkoordinasi, merata dan mempertimbangkan kendala dan resiko yang mungkin terjadi sebelum menetapkan kebijakan. Antusias para relawan yang turut membantu pemerintah desa dalam penjaan gapuro, penyemprotan disinfektan, memeriksa toko-toko di desa, menjaga pasar. Disisi lain terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat pada proses rekonstruksi dapat mempermudah pemerintah, selain itu adanya partisipasi masyarakat dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat karena adanya kerjasama dalam hal pemulihan sosial-ekonomi, pendistribusian bantuan dan lainnya. Hubungan yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah dalam proses ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak dapat berdiri tanpa bantuan masyarakat karena keterbatasan pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan maupun sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Adanya keefektifan dalam partisipasi tersebut dapat lebih ditingkatkan dengan motivasi dan dilaksanakan secara kontinu. Proses partisipasi tersebut diharapkan

dapat mencapai hasil yang konsesus dan mencapai kesepakatan bersama. Adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah dapat menumbuhkan rasa memiliki tanggung jawab di masyarakat serta mencerdaskan masyarakat lokal dalam hal kebencanaan.

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Bisa dipastikan dalam kehidupan keseharian manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Adanya ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi adanya ekonomi sangat penting dalam kehidupan. Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur tentang perekonomian dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konsep kesejahteraan negara, dimana pemerintah berhak ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan nasional dalam sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional.

Harapan ke pemerintah dalam memberikan bantuan harus dapat berubah total dengan adanya wabah dan menggiring desa sebagai peminta-minta saja terhadap kejadian seperti saat ini. Covid-19 ini menjadikan perekonomian dan pembangunan desa mengalami proses pengkebirian yang dirasakan langsung oleh aparat desa tapi tentunya tidak untuk para petani yang sudah terbiasa mencari sendiri untuk mencukupi kebutuhan dan membangun keluarganya. Bantuan-bantuan pemerintah dalam bentuk ekonomi diberikan pada masyarakat desa tidak lagi tangguh dan hanya mengharapkan belas kasihan pemerintah. Menjamurnya bantuan yang kurang terstruktur menjadikan desa pasca reformasi, menjadi salah satu alasan bagi pemerintah atas keberhasilan perekonomian tanpa memperhatikan dampak mental desa. Kondisi yang terjadi akibat Covid-19 memaksa pemerintah untuk semakin gencar memberikan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

peringatan-peringatan akan bahaya Covid-19, hasilnya masyarakat tidak menuruti pemerintah tanpa adanya imbalan berupa materi. Seharusnya kebijakan yang diambil dapat membantu masyarakat agar mandiri, misalnya mereka dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bahan pokok panganan hasil tanam sendiri, mengembangkan inovasi-inovasi dimana mandiri dalam perekonomiannya. Membuat sebuah usaha dalam lingkup desa dimana hasilnya kembali untuk mereka. Jika seperti itu maka mereka akan berusaha dan bertanggung jawab sendiri, tanpa menunggu dan meminta bantuan pada pemerintah. Perlu sekali membuat kebijakan yang dapat mengedukasi masyarakat bagaimana caranya dapat menjadi desa tangguh dalam segi panganan dan perekonomian dan segala macamnya, agar menjadi desa mandiri tidak meminta-minta bantuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah desa sudah direncanakan dan dipertimbangkan secara menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dibidang ekonomi. Dalam penjelasan lainnya, desa sebagai organisasi kekuasaan ditingkat lokal yang ada di Indonesia, dimana mempunyai wewenang tertentu karena bagian dari pemerintah negara (Sarip, Syarifudin Aip, Muaz Abdul, 2020). Kejadian yang saat ini terjadi karena Covid-19 menjadikan perekonomian menurun, sehingga perlu melakukan pemulihan pasca bencana yang terencana. Implikasinya dalam rekonstruksi pasca bencana merupakan proses pemulihan bencana. Aktivitas pada masa ini lebih menitik beratkan kepada pembangunan kembali dalam jangka panjang di berbagai aspek dimana kegiatan yang berlangsung membutuhkan koordinasi dan perencanaan yang signifikan serta saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara utuh. Rekonstruksi pasca bencana melingkupi berbagai aspek seperti perumahan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, sosial- psikologi dan pelayanan publik sebagai fokus pemulihan. Disisi lain Pemerintah lokal seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun

desa, memiliki peran dalam memastikan kelancaran program rekonstruksi. Pemerintah lokal diberi tanggung jawab dalam hal ini karena dianggap sebagai aktor yang paling memahami kondisi wilayah kekuasaan mereka, sehingga mereka dapat bertindak secara cepat dalam menangani situasi pasca bencana tanpa harus menunggu intruksi dari pemerintah pusat atau provinsi. Dalam penjelasan lainnya mengenai tahapan manajemen bencana, tahapan pertama pra bencana merupakan tahapan manajemen bencana yang dilakukan sebelum kejadian bencana, yang meliputi kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; tahap kedua saat kejadian bencana tahapan yang paling penting dalam manajemen bencana adalah ketika bencana itu terjadi. Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan dengan segera ketika bencana terjadi untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Selama kegiatan tanggap darurat hal yang dilakukan yaitu menanggulangi bencana sesuai dengan sifat dan jenisnya. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menanggulangi berbagai macam bentuk bencana, oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk menangani berbagai jenis bencana; tahap ketiga pasca bencana merupakan tahap yang dilakukan setelah proses tanggap darurat dilewati. Upaya dalam tahap pasca bencana adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (Setyowati C.A, Suryaningsih M. 2018). Dalam penjelasan lainnya kejadian bencana dapat mengakibatkan berbagai dampak termasuk diantaranya kerusakan fisik, ekonomi, dan sosial lalu jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana fisik, serta kerugian ekonomi dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat yang selamat dari bencana. Proses pemulihan pasca bencana menjadi fase yang penting dalam mengembalikan kehidupan masyarakat pasca bencana (Sagala Saut, Situngkir Fernando, Wimbardana Ramaditya, 2020).

Pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tentang penanggulangan bencana mengamanatkan pemerintah sebagai

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

penyelenggara utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana termasuk sektor perumahan. Akan tetapi, dengan keterbatasan yang dimiliki, perlu didorong peran serta dari berbagai pihak, perlu didorong peran serta dari berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, badan bantuan luar negeri dan donor, sehingga bantuan pemulihan dapat dilaksanakan dengan efektif. Disisi lain masyarakat yang terkena bencana, memiliki keterbatasan untuk memulihkan kembali kondisinya karena memiliki keterbatasan sumber daya (Sagala Saut, Situngkir Fernando, Wimbardana Ramaditya, 2020). Secara garis besar tugasnya BPNP yaitu menanggulangi kejadian bencana alam, dalam proses penanggulangan bencana dilakukan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi (Renaksi RR) wilayah pasca kejadian bencana alam. Sedangkan rehabilitasi merupakan langkah perbaikan dan pemulihan dalam semua sektor menyangkut pelayanan publik atau masyarakat. Rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali prasarana dan sarana pada wilayah terdampak, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat. Dalam merumuskan Renaksi RR menggunakan beberapa komponen yang mengacu pada aspek fisik dan aspek kemanusiaan, yaitu *Damages and Losses Assesment* (DaLA) atau penilaian kerusakan dan kerugian, *Human Recovery Need Assesment* (HRNA) atau pengkajian kebutuhan pemulihan manusia. DaLA dan HRNA dikelompokkan dalam beberapa aspek atau sektor yang terkena dampak pascabencana alam. (Cholil Rohman Saifur, Pinem Ristadi Praba Augusta, Vydia Vensy, 2018)

Perencanaan pembuatan kebijakan rekonstruksi pasca bencana memang harus direncanakan dengan matang, bermutu, terkoordinir dan merata pada seluruh aspek yang membutuhkan. Di samping itu dalam penanganan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya dilakukan secara normalisasi saja, melainkan adanya rekonstruksi agar dapat berkelanjutan. Selain itu dapat belajar dari suatu bencana agar dapat melakukan perbaikan dalam segala aspek. Jadi implementasi

kebijakan pemerintah Desa Lowayu dalam menangani ekonomi pasca pandemi Covid-19 ada empat, pertama mengenai menutup pasar untuk masyarakat umum dan membuka kembali saat transisi new normal; kedua mengenai pedagang dari luar desa dilarang berdagang saat pandemi Covid-19 lalu saat transisi new normal diperbolehkan lagi; ketiga mengenai pemilik toko harus menyediakan tempat cuci tangan saat pandemi bahkan pasca pandemi; keempat mengenai pengirim barang baik pos maupun pemasok barang ke toko-toko di Lowayu saat pandemi diperbolehkan menurunkan barang saja tanpa masuk toko sedangkan pasca pandemi diperbolehkan masuk toko dengan syarat memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat demi menjaga masyarakatnya agar tetap sehat dan nyaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam rekonstruksi ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai penutupan Pasar Turi Lowayu untuk sementara saat pandemi Covid-19 untuk masyarakat umum, dimana hanya masyarakat lokal saja yang diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi di pasar. Dengan syarat menggunakan masker, cuci tangan dan disemprot disinfektan. Namun di masa transisi new normal Pemerintah Desa Lowayu membuat kebijakan dimana pasar kembali di buka untuk masyarakat umum, dengan syarat menggunakan masker dan cuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kegiatan perekonomian di pasar akan dinormalisasikan kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
2. Kebijakan mengenai pedagang dari luar desa saat pandemi tidak diperbolehkan untuk berdagang, sedangkan dimasa transisi new normal diperbolehkan kembali untuk berdagang dengan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

memakai masker dan mengikuti ajuran protokol kesehatan. Kebijakan tersebut ditetapkan tanggal 18 Juni sudah diperbolehkan berdagang di Desa Lowayu.

3. Kebijakan mengenai pemilik toko-toko di desa baik material, sembako dan lain sebagainya. Setiap toko-toko harus menyediakan tempat cuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan tersebut ada demi menjaga kesehatan dan kenyamanan masyarakat desa.
4. Kebijakan mengenai pengirim barang baik pos atau pemasok barang ke toko-toko di Desa Lowayu disaat pandemi untuk menurunkan barang saja tanpa masuk ke toko, selain itu hanya pemasok barang toko-toko besar saja yang diperbolehkan masuk, dengan syarat memakai masker, di cek suhu, cuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan. Namun di masa transisi new normal untuk pemasok barang diperbolehkan masuk ke toko dengan syarat menggunakan masker. Kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

SARAN

Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mengenai rekonstruksi ekonomi pasca pandemic Covid-19 dibuat demi kebaikan masyarakat. Adanya Covid-19 memang banyak terkena dampak, jadi membuat Kebijakan perlu sekali melihat apa yang dibutuhkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam P C., Herbasuki N., Susi S. (2013). *Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah* diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/99709-ID-upaya-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-wila.pdf>.
- Bachri, B. S. (2020). Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 55.
- Channel New Asia. (2020). *Wuhan Virus Outbreak: 15 medical workers infected 1 in critical condition* diambil dari <https://www.channelnewasia.com/asia/wuhanpneumonia-outbreak-health-workers-coronavirus-12294212>
- Cholil Rohman Saifur, Pinem Ristadi Pinem, Vydia Vensy. (2018). Implementasi Metode Simple Multi Atribute Rating Technique Untuk Penentuan Prioritas Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam. *Jurnal Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 4(1), 2.
- CNN Indonesia. (2020). *Jokowi Rilis Aturan Pemulihan Ekonomi Akibat Corona* diambil dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200512133959-532-502506/jokowi-rilis-aturan-pemulihan-ekonomi-akibat-corona>.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 147-156.
- Ibrahim, Kamaluddin, Mas'ad, Mintasrihardi, AM Junaidi, Gani A A. (2020). *Bencana Virus Corona Melalui Sosialisasi Pada Anak Usia Dini Pada Desa Rempe Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 191.
- Kompas. (2020). *Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19 Begini Prediksi Gita Wirjawan* diambil dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/06/14/16040026/ekonomi-pasca-pandemi-covid-19-begini-prediksi-gita-wirjawan>.
- Kompas. (2020). *Ancaman Resensi Di Tengah Pandemi* diambil dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/13/091745165/ancaman-resensi-di-tengah-pandemi>.
- Liputan 6. (2020). *Gresik Pakai Dana Darurat Percepatan Penanganan Corona Covid-19* diambil dari <https://m.liputan6.com/surabaya/rea>

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 348 - 359	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

d/4207531/gresik-pakai-dana-darurat-percepatan-penanganan-corona-covid-19.

- Sagala A.S, Lutfiana D, Wimbardana R. (2009). *Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat: Studi Kasus Kabupaten Bandung Jawa Barat*, diambil dari <https://www.rdi.or.id>.
- Sagala S, Situngkir F, Wimbardana R. (2013). Interaksi Aktor Dalam Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Mimbar*, 29(2), 217-218.
- Sarip, Syarifudin Aip, Muaz Abdul. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 11
- Setyowati C A., Suryaningsih M. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Departemen Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 7(2), 7-8.
- WHO. (2020). *WHO Director-General's Remarks At The Media Briefing O 2019-nCov On 11 Februari 2020* diambil dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Wellness And Healthy*, 2(1), 1-2.